

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang terletak di antara 3 lempeng besar yaitu lempeng Indo Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Selain itu Indonesia juga berada dalam *Pacific Ring Of Fire*. Oleh karena itu Indonesia merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Menurut UU Nomer 24 Tahun 2007, bencana di bedakan menjadi 3 yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana-bencana ini sangat dipengaruhi oleh kerentanan masyarakat, bahaya bencana, kapasitas dan resiko bencana tersebut. Dalam kajian *Centre for Research on the Epidemiology of Disaster* (CRED) tahun 2008-2013 menunjukan indonesia pada posisi ke 5 besar didunia negara paling sering terkena bencana alam.

Sepanjang 2021 terhitung mulai 1 Januari hingga 28 Desember 2021, bencana alam yang terjadi di Indonesia mencapai 3.058 kejadian. Bencana banjir mendominasi kejadian bencana alam yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, yaitu mencapai 1.288 kejadian atau 42,1%. Selain banjir, cuaca ekstrem merupakan kejadian bencana alam yang juga banyak terjadi di Indonesia, yakni ada 791 kejadian. Lalu, 623 kejadian bencana alam yang melanda Indonesia sepanjang tahun ini merupakan tanah longsor. Dari ribuan bencana alam yang melanda Indonesia, berbagai fasilitas umum hingga rumah dan bangunan turut terdampak. Sebanyak 141.795 rumah, 3.699 fasilitas publik, 509 kantor, dan 438 jembatan mengalami kerusakan.

Penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor yang terlibat tidak hanya pemerintah. Penanggulangan bencana juga diminati oleh organisasi non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, (LSM), Komunitas bahkan perkumpulan RT atau sebagainya tak jarang akan terlihat aktif dalam membantu warga yang terdampak bencana. Tidak semua personel yang terlibat merupakan karyawan perusahaan atau pekerja yang ikut hadir dalam proses penanggulangan bencana. Tak jarang banyak pula yang merekrut relawan atau memang merupakan organisasi relawan yang melakukan swadaya secara mandiri. Dengan resiko yang tinggi di lapangan tentu sebaiknya semua personel dibekali dengan asuransi keselamatan salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan untuk relawan pada awalnya diinisiasi oleh filantropi Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2018 dalam Festival Filantropi Indonesia yang berkerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja kemanusiaan ataupun relawan termasuk dalam pekerja bukan penerima upah yang merupakan salah satu sector yang dapat terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan turut serta melindungi para relawan kemanusiaan, sosial, pendidikan, lingkungan dan lainnya yang benar-benar membutuhkan jaminan bagi perlindungan dalam pelaksanaan tugas-tugas sosial mereka. Pekerjaan yang dilakukan para pekerja dan relawan organisasi filantropi tergolong pekerjaan yang rentan serta memiliki risiko tinggi dengan bepergian dan beraktivitas di tempat yang jauh, terpencil dan berbahaya seperti daerah konflik, bencana alam, dan pedalaman yang sering pula

mereka pulang dalam keadaan yang tidak sempurna, cacat bahkan meninggal dunia.

"Siapa pun yang merekrut atau mempekerjakan relawan diwajibkan memberi perlindungan dan jaminan sosial. Paling tidak jaminan kematian dan kecelakaan kerja," menurut Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, Hamid Abidin, dalam diskusi virtual bertema 'Perlindungan dan Jaminan Sosial Relawan Covid-19, Tanggung Jawab Siapa?', Selasa, 12 Mei 2020 (Hukmana, 2020). ada sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi setiap lembaga dalam memberikan jaminan sosial kepada tenaga relawan. Faktor utamanya, karena minimnya pengetahuan dan kesadaran baik dari relawan maupun lembaga. Kendala juga terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya organisasi. Lembaga belum paham terkait cara pembayaran premi bagi tenaga relawan, sebab anggaran hanya diperuntukan bagi karyawan.

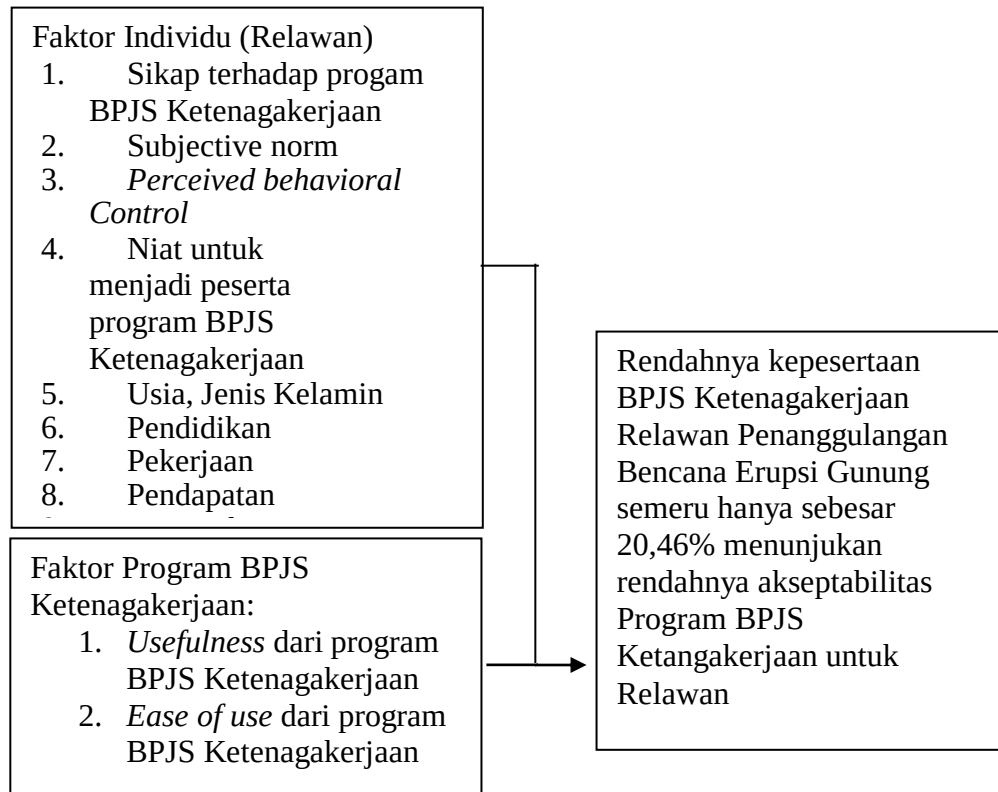
Salah satu bencana yang cukup mendapat perhatian masyarakat pada bulan Desember 2022 bencana alam yang cukup besar yaitu erupsi awan panas guguran (APG) Gunung Semeru yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 hingga saat ini masih mengakibatkan ribuan warga mengungsi. Berdasarkan data yang ada dalam deskrelawan total organisasi yang terdaftar adalah 252 organisasi dengan klaim jumlah personel sebanyak 4006 personel. Untuk dapat melindungi relawan pemerintah pusat melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan program BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 20 Desember 2021 yang dikelola oleh deskrelawan. Berdasarkan hasil wawancara dari total 1500 kuota yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana

(FPRB) Jawa Timur pendaftar hanya sebesar 307 orang atau jika dipersentasekan hanya 20,46% yang memenuhi kuota. Dalam wawancara dengan admin deskrelawan hal ini dikarenakan kurangnya edukasi petingnya jaminan keselamatan untuk relawan, kurangnya informasi yang massif kepada para relawan sehingga banyak relawan yang tidak tertarik untuk mendaftar. Selain itu juga kurang terdatanya relawan yang benar-benar hadir dalam proses penanggulangan bencana dan terlibat dilapangan tidak hanya klaim jumlah anggotanya saja.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan serta mengingat isu serta bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi belum lama ini dan adanya program BPJS Ketenagakerjaan untuk relawan. Maka masalah yang diangkat oleh peneliti adalah rendahnya minat relawan penanggulangan bencana Erupsi Gunung Semeru dalam mendaftar BPJS Ketenagakerjaan tahun 2021 hanya sebesar 20,46%. Maka perlu dilakukan penelitian untuk melihat faktor yang mempengaruhi akseptabilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk relawan penanggulangan bencana erupsi Gunung Semeru.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah rendahnya kepesertaan relawan respon erupsi Gunung Semeru dari kuota 1500 yang disediakan pemerintah hanya 307 atau 20,46%. Hal ini menunjukkan rendahnya akseptabilitas program BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan. Berdasarkan permasalahan tersebut, variable yang memungkinkan berpengaruh adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah

Dari gambar 1.1, dapat diuraikan terjadinya masalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu, faktor organisasi dan faktor lingkungan. Berikut ini uraian penjelasan dari gambar di atas.

1. Karakteristik Individu (Jenis Kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan)

Setiap individu memiliki karakteristik masing-masing dan berbeda antar individu. Karakteristik peserta prolanis meliputi Jenis Kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan, dan Pekerjaan.

2. *Perceived Usefulness* Program BPJS Ketenagakerjaan

Usefulness dapat digambarkan sebagai kualitas pelayanan yang diberikan.

Perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja

pekerjaannya (Davis, 1986). Relawan akan merasakan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ketika dapat memberikan kepastian jaminan keselamatannya, menjamin biaya pengobatan jika terjadi kecelakaan, serta memberikan jaminan kepada ahli waris yang ditinggalkan apabila meninggal dunia. Relawan yang memiliki penilaian *perceived usefulness* yang baik akan memiliki akseptabilitas program BPJS Ketenagakerjaan yang baik.

3. *Perceived Ease of use* dari program BPJS Ketenagakerjaan

Semakin mudah mendapatkan jaminan keselamatan maka semakin kecil resiko penolakan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Persepsi kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi bebas dari usaha (Davis, 1986). Masyarakat akan percaya atau memiliki persepsi kemudahan penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan ketika masyarakat dapat merasakan dan mudah mendapatkan klaim jika terjadi kecelakaan ataupun kemudahan terhadap akses informasinya.

4. Pengetahuan

Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek memiliki tingkatan yang berbeda. Pengetahuan mahasiswa dan orang tua mahasiswa terkait program BPJS Ketenagakerjaan mempengaruhi akseptabilitas program BPJS Ketenagakerjaan. Mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang memiliki pengetahuan baik maka akan menerima program BPJS Ketenagakerjaan begitupula sebaliknya.

5. Sikap terhadap program BPJS Ketenagakerjaan

Sikap didefinisikan oleh Davis et al. (1989) sebagai perasaan-perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Pada hal ini kaitanya sikap relawan pada penyelenggaraan BPJS Ketengakerjaan. Relawan yang memiliki penilaian sikap yang baik. Maka, akseptabilitas terhadap program BPJS Ketengakerjaan juga baik.

6. *Subjective norm*

Norma subyektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Relawan yang memiliki penilaian *subjective norm* baik, maka akan menerima program BPJS Ketenagakerjaan.

7. *Perceived Behavioral control*

Persepsi pengendali perilaku (*perceived control*) didefinisikan sebagai persepsi dan konstruk internal dan eksternal dari perilaku (Taylor dan Tood, 1995). *Perceived control* dibentuk oleh *control beliefs* dan *perceived power*. Keyakinan bahwa perilaku dapat dilaksanakan (*control beliefs*) diperoleh dari berbagai hal, pertama adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain (misalnya teman). Keyakinan individu mengenai suatu perilaku akan dapat dilaksanakan ditentukan juga oleh ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, tersedianya fasilitas untuk melaksanakannya, dan kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat *perceived power* atau pelaksanaan perilaku (Juniarta, 2015). Relawan mahasiswa yang

memiliki penilaian *perceived behavioral control* baik. Maka, akseptabilitas terhadap program BPJS Ketenagakerjaan juga baik.

8. Niat

Niat adalah kecenderungan seseorang untuk suatu perilaku yang tertentu. Jadi, Relawan akan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila terdapat niatan dalam dirinya, yang ditentukan oleh sikap, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.

9. Pendapatan

Pendapatan merupakan unsur penting pada perekonomian untuk meningkatkan derajat hidup orang banyak. Pendapatan mempengaruhi kecendurungan memanfaatkan pelayanan kesehatan, namun di era JKN masyarakat berpendapatan tinggi maupun rendah diwajibkan untuk mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu.

1.3 Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh *background factors* terhadap *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* program BPJS Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pengaruh *perceived ease of use* terhadap *perceived usefulness* pada relawan penanggulangan bencana Erupsi Gunung Semeru?

3. Bagaimana pengaruh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* terhadap sikap relawan penanggulangan bencana Erupsi Gunung Semeru?
4. Bagaimana pengaruh *perceived usefulness*, sikap, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* terhadap niat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan?
5. Bagaimana pengaruh *perceived behavioral control* dan niat terhadap akseptabilitas program BPJS Ketenagakerjaan?

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor yang mempengaruhi akseptabilitas program BPJS Ketenagakerjaan pada relawan penanggulangan bencana erupsi gunung semeru.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis pengaruh *background factors* terhadap *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Menganalisis pengaruh *perceived ease of use* terhadap *perceived usefulness* pada relawan penanggulangan bencana erupsi gunung semeru.
3. Menganalisis pengaruh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* terhadap sikap relawan penanggulangan bencana erupsi gunung semeru.

4. Menganalisis pengaruh *perceived usefulness*, sikap, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* terhadap niat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
5. Menganalisis pengaruh *perceived behavioral control* dan niat terhadap akseptabilitas program BPJS Ketenagakerjaan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai upaya dan sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan serta menambah wawasan dalam bidang penelitian ilmiah.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Bahan masukan bagi peneliti selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan akseptabilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan penanggulangan bencana.

1.5.2 Manfaat Bagi Relawan

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi relawan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi akseptabilitas program BPJS ketenagakerjaan dan meningkatkan pengetahuan Relawan.